

PENGARUH ANGGARAN DANA DESA DAN EKONOMI PENGEMBANGAN KABUPATEN MALANG TERHADAP PENDAPATAN DESA BERDASARKAN PMK NOMOR.205/PMK.07/2019

(STUDI KASUS DESTINASI WISATA CAFE SAWAH PUJON KIDUL)

Shella Wati Fauzi, Fatimah Riswati
Universitas Wijaya Putra Surabaya
shellawfauzi87@gmail.com

ABSTRAK

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pujon Kidul adalah salah satu desa yang berhasil menerapkan program pengembangan desa wisata dengan destinasiya Cafe Sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran dana desa dan ekonomi pengembangan Kabupaten Malang terhadap pendapatan desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang yang diambil dari pengunjung dan pelaku usaha yang berada di kawasan destinasi wisata Cafe Sawah Pujon Kidul, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*, dengan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer melalui penyebaran angket kuisisioner. Analisis data dilakukan menggunakan statistik dengan aplikasi bantu SPSS versi 21. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan uji hipotesis dana desa dan ekonomi pengembangan, secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan desa. Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa dana desa dan ekonomi pengembangan yang dikelola dan diawasi pemerintah desa serta masyarakat Pujon Kidul terbukti dapat meningkatkan pendapatan desa Pujon Kidul.

Kata Kunci : *dana desa, ekonomi pengembangan, pendapatan desa*

ABSTRACT

A tourism village is a form of integration between attractions, accommodation and supporting facilities that are presented in a structure of community life that is integrated with the prevailing procedures and traditions. Pujon Kidul is one of the villages that has successfully implemented a tourism village development program with the destination of Cafe Sawah. This research aims to examine and analyze the effect of the village budget and the development economy of Malang Regency on village income. The number of samples in this research were 70 people who were taken from visitors and business actors in the tourist destination area of Cafe Sawah Pujon Kidul, using non-probability sampling techniques, with accidental sampling method. Collecting data using primary data sources through distributing questionnaires. Data analysis was carried out using statistics with the SPSS version 21 application. The research method used was a quantitative approach. Based on the hypothesis test of village funds and economic development, partially and simultaneously have a positive and significant effect on village income. So it can be concluded that the results of this research show that village funds and economic development that are managed and supervised by the village government and the Pujon Kidul community are proven to increase the income of Pujon Kidul village.

Keywords: *village funds, economic development, village income*

PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Tidak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dirasa berhasil apabila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan. Adapun pengertian pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Keuangan Nomor.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa).Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (Permendagri No.20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.26/UM.001/MKP/2010). Pengembangan desa wisata menjadi *trend* di banyak desa di Indonesia saat ini serta menjadi energi positif bagi

perkembangan wisata lokal karena bisa meningkatkan perekonomian terutama desa yang mengembangkannya. Wisatawan lokal adalah sasaran utama pengembangan wisata di desa. Selain itu manfaat lainnya adalah menjadikan lingkungan desa menjadi indah dan tertata serta menjadi daya tarik tersendiri bagi desa tersebut untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar. Dalam hal ini salah satu contoh yang bisa dilihat adalah desa wisata adalah wisata di daerah kabupaten Malang yaitu seperti Cafe Sawah Pujon Kidul, Kampung Warna-Warni, Kampung TriDi, Kampung Topeng, Taman Wisata Wendit, dan lainnya.

Pemahaman tentang desa wisata cukup beragam antara lain mengatakan adalah desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.26/UM.001/ MKP/2010). Dalam pelaksanaannya seringkali wisatawan tinggal di dalam atau dekat dengan suasana tradisional dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat, sehingga ada proses belajar (*learning*) dari masyarakat (*hosts*) kepada wisatawan (*guests*), sehingga para tamu mampu memberikan penghargaan (*rewarding*) kepada nilai-nilai lokal yang masih dianut oleh komunitas setempat. Wisatawan yang datang ke desa wisata itu akan dapat menikmati alam perdesaan yang masih bersih dan merasakan hidup di suasana desa dengan sejumlah adat istiadatnya.

Dari pengembangan infrastruktur dasar dan lokasi wisata di desa, diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi warga setempat. Sehingga, ke depan tingkat pendapatan dan sumbangan konsumsi masyarakat desa ke pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional lebih terasa. Selain mengubah arah penggunaan, pemerintah juga akan memberikan tambahan Dana Desa untuk pengembangan lokasi desa wisata. Dan diharapkan dengan anggaran dana desa dari Pemerintah dapat menjadikan sebuah desa wisata yang maju dan menghasilkan pendapatan yang optimal.

Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka anggaran yang dibuat juga harus disesuaikan dengan pengalokasiannya, dalam hal ini dibutuhkan pengawasan pada saat keseluruhan rangkaian kegiatan yang sedang dilaksanakan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, sementara penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa atau pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa, sampai upah pamong desa.

Sumber Pendapatan Desa

Menurut Permendagri No.20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa » pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Transfer » pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa yang terdiri atas dana desa, pajak atau retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.
3. Pendapatan Lain » merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, pendapatan lain desa yang sah.

Manfaat Pendapatan Desa

Pendapatan desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Manfaat dari pendapatan desa sendiri adalah :

a) **Pengentasan Kemiskinan**

Pendapatan desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di desa.

b) **Pendapatan Desa untuk Pemerataan Pembangunan**

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pendapatan desa dapat lebih dioptimalkan untuk segala macam program guna memajukan desa, serta diikuti penguatan kelembagaan dan keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

c) **Pendapatan Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi**

Pendapatan Desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak berurbanisasi. Pendapatan desa yang dikelola sesuai peraturan perundangan bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Seperti yang terjadi di Desa Pujon Kidul, berkat pengelolaan wisata Cafe Sawah Pujon Kidul, ratusan pemuda mendapat pekerjaan kreatif mengelola objek wisata di desa mereka.

Ruang Lingkup Perencanaan Desa

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalian gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana rencana pembangunan menurut undang undang tersebut dibagi menjadi :

1. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, RPJM Daerah (Kabupaten/Kota), memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program satuan kerja.
2. RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan) adalah dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa memuat kebijakan, prioritas program,

dan kegiatan pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat.

3. APB-Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran dimana, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Buku Saku Dana Desa, 2017).

Prinsip Dana Desa

Prinsip penggunaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 pada pasal 3 adalah :

- a) Keadilan » dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b) Kebutuhan prioritas»dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c) Tipologi desa » dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Tujuan Dana Desa

Dari pernyataan diatas menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sendiri adalah :

1. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit.
2. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.
3. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.
4. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri.
5. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik, memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No.16 Tahun 2018 yaitu :

a) Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti :

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu, warga, kelompok masyarakat, antara lain :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swa- medikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbaru dan pelestarian lingkungan hidup;

8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pengertian Ekonomi Pengembangan

Pengembangan Ekonomi adalah proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan atau lokasi yang dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh Helmsing dan Najiyati, (2015:220).

Diungkapkan bahwa pengembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta yang didirikan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian dengan baik sebuah wilayah tertentu Helmsing dan Purnamaningsih, (2016:2).

Tujuan dan Sasaran Ekonomi Pengembangan

Dalam usaha memajukan ekonomi pengembangan ada beberapa tujuan dan sasaran didalamnya, diantaranya meliputi :

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif;
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam percepatan pengembangan ekonomi diantara *stakeholder* secara sinergi;
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal;
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan;
5. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pendekatan Ekonomi Pengembangan

Ekonomi Pengembangan menyediakan ruang dan membuka kesempatan kepada seluruh komponen dalam suatu komunitas baik pemerintah, swasta, organisasi non profit dan masyarakat sipil lokal untuk bekerja sama memperbaiki perekonomian lokal. Jadi pendekatan pengembangan ekonomi lokal merupakan pendekatan yang terintegrasi atau terpadu yang terdiri dari :

a) Pengembangan Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi dan berkelanjutan *World Economic Forum Competitiveness Report*, (2001). Dengan kata lain, daya saing merupakan suatu cara dasar untuk meningkatkan standar hidup dengan cara menyediakan kesempatan kerja bagi pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan. Daya saing bukan tujuan akhir atau sebuah sasaran, melainkan suatu cara untuk mencapai tujuan akhir. Kemampuan daya saing suatu daerah juga sangat dipengaruhi oleh faktor komoditas yang dikembangkan. Pemilihan komoditas dalam menentukan daya saing bersifat krusial, mengingat hal yang menentukan daya saing adalah komoditas. Dengan kata lain, bagaimana komoditas tersebut mampu mempertahankan posisi perekonomian suatu wilayah.

b) Pengembangan Klaster

Klaster industri sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Suatu klaster memiliki dimensi yang berhubungan dengan produsen pengeksport, pemasok dan

perantara, serta institusi dasar yang memberikan input (ide, inovasi, modal dan prasarana). Klaster industri ini diharapkan dapat mendorong perkembangan sistem industri daerah melalui fokus pada dukungan terhadap industri sejenis yang potensial sebagai basis ekspor keluar daerah. Hubungan keterkaitan antar industri dan meningkatnya pendapatan daerah dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas (*multiplier effects*). Strategi pengembangan kawasan berbasis klaster industri memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan klaster industri memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja langsung dengan industri-industri dan mengembangkan strategi dalam membangun ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Strategi ini menyediakan suatu kerangka bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan bagi keseluruhan klaster sehingga memberikan dampak yang maksimal Bappenas, (2005).

c) Pengembangan Kelembagaan

Keberadaan lembaga formal dan informal menjadi salah satu modal yang harus dibentuk dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Kelembagaan ini nantinya akan menjadi sebuah media pilihan ketika masalah-masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan lagi dengan mekanisme pasar. Kelembagaan formal maupun informal yang dibentuk dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis transaksi menjadi sebuah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan norma masyarakat Arsyad dkk., (2015). Ketersediaan organisasi sosial kemasyarakatan seperti LSM juga perlu diperhatikan. Selain sebagai lembaga pengontrol kinerja pembangunan, LSM juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai hal-hal yang menunjang kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Kemudian terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan indikator institusi yang baik. Lembaga ini dapat mewakili suara dan inspirasi masyarakat dalam penentuan program-program dan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal.

d) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Era informasi dan teknologi yang berkembang semakin membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai dengan baik, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam konteks proses produksi, adanya penguasaan teknologi yang baik akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan penemuan produk-produk baru dan cara produksi yang lebih efisien sehingga akan mempermudah proses produksi Barro dan Romer, (2015). Sehingga dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam pencapaian pengembangan ekonomi lokal. Sumber daya manusia yang ada, selain sebagai tenaga produksi juga diharapkan mampu menciptakan produk bernilai tinggi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.

e) Penguasaan Teknologi

Dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kemajuan teknologi oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan merupakan faktor penentu keberhasilan. Penguasaan teknologi adalah bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan produksi. Menggunakan kemampuan teknologi yang semakin canggih, diharapkan dapat membuat sebuah inovasi terhadap suatu produk agar memberikan input yang lebih besar. Teknologi di negara maju dewasa ini merupakan kapital intensif yang

membutuhkan modal yang besar. Sebaliknya, di negara-negara sedang berkembang umumnya dibutuhkan juga kelebihan tenaga kerja, khususnya yang tingkat pendidikannya rendah. Pada hakikatnya negara berkembang memerlukan jenis teknologi yang agak berlainan dengan negara maju. Kalau negara sedang berkembang meniru dan mengalihkan teknologi yang dipakai di negara maju, hal ini akan membawa banyak persoalan, terutama karena teknologi tersebut kurang bahkan tidak tepat guna.

Dimensi Ekonomi Pengembangan

Dalam heksagonal terdapat enam segitiga yang merupakan komponen pengembangan ekonomi lokal yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan ekonomi wilayah secara berkelanjutan (Bappenas, 2006). Enam dimensi atau aspek dalam ekonomi pengembangan lokal adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Heksagonal Ekonomi Pengembangan



Sumber : Bappenas (2006)

- a. Kelompok Sasaran
 - 1) Investor luar : Peraturan tentang kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi.
 - 2) Pelaku usaha lokal : Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan.
 - 3) Pelaku usaha baru : Pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, insentif, kecepatan ijin.
- b. Faktor Lokasi
 - 1) Faktor lokasi terukur : Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil, jumlah lembaga keuangan lokal.
 - 2) Faktor lokasi tidak terukur untuk dunia usaha : Peluang kerjasama, lembaga penelitian.
 - 3) Faktor lokasi tidak terukur individual : kualitas pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, etos kerja SDM.
- c. Kesinergian dan fokus kebijakan

- 1) Perluasan ekonomi : Kebijakan » investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas : Kebijakan » pemberdayaan berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan.
 - 3) Pembangunan wilayah : Kebijakan » kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang ekonomi pengembangan lokal, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan.
- d. Pembangunan Berkelanjutan
- 1) Ekonomi : pengembangan industri pendukung, perusahaan dengan *business plan*, perusahaan dengan inovasi.
 - 2) Sosial : kontribusi terhadap kesejahteraan, ekonomi pengembangan lokal dan adat atau kelembagaan lokal.
 - 3) Lingkungan : Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, daur ulang, kebijakan konservasi Sumber Daya Alam.
- e. Tata Pemerintahan
- 1) Kemitraan pemerintah dan dunia usaha : Kemitraan » infra struktur dan supra struktur, promosi dan perdagangan, pembiayaan.
 - 2) Reformasi sektor publik : Reformasi » sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik.
 - 3) Pengembangan organisasi : asosiasi industri » status, peran, manfaat.
- f. Proses Manajemen
- 1) Diagnosa secara partisipatif : Analisis dan pemetaan » potensi ekonomi, daya saing, kondisi politik lokal, serta identifikasi *stakeholder*.
 - 2) Perencanaan dan implementasi secara partisipatif : Diagnosis vs perencanaan, jumlah *stakeholder*, sinkronisasi (sektoral dan spasial), implementasi vs perencanaan.
 - 3) *Monev* secara partisipatif : Keterlibatan *stakeholder* » indikator dan monitoring serta evaluasi (*monev*).
Frekuensi » monev dan diskusi pemecahan masalah, hasil *monev* vs perencanaan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan antar *variable* dalam permasalahan yang ditetapkan IndrawandanYuniarti, (2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, kuisioner, penelitian kepustakaan dan mengakses website situs-situs terkait. Jenis instrument penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner akan dianalisis dengan menghitung skor dari setiap pernyataan. Selanjutnya diambil kesimpulan mengenai kondisi setiap item pernyataan pada objek yang diteliti. Dengan menggunakan rentang skala 1 sampai 4, dimana semakin tinggi nilai skor yang diberikan maka akan semakin baik nilai indikator tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono, (2016) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Lokasi atau Obyek Penelitian

Cafe Sawah merupakan destinasi wisata unggulan Kabupaten Malang berbasis masyarakat lokal yang dikelola oleh sebuah organisasi desa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) "Capung Alas". Berdasarkan pemetaan-nya luas wilayah Cafe Sawah Desa Pujon Kidul adalah sekitar 8000m². Secara administratif Cafe Sawah terletak di Kabupaten Malang yang tepatnya berada di Jl. Raya Krajan, Krajan, Pujon Kidul, Kec. Pujon, Malang, Jawa Timur 65391. Luas wilayah Desa Pujon Kidul sendiri kurang lebih 323.159 Hektar.

Diskripsi Variabel Dana Desa, Ekonomi Pengembangan dan Pendapatan Desapada Desa Wisata Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang

Dari hasil Penelitian, berdasarkan karakteristik responden, dengan jumlah sampel sebanyak 70 responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin Wanita sebesar 59% atau 41 orang dan yang berjenis kelamin Pria sebanyak 41% atau 29 orang. Karakteristik responden berdasarkan usia antara 17-20 tahun sebanyak 21% atau 15 orang, usia antara 21-30 tahun sebanyak 46% atau 32 orang, usia antara 31-40 tahun sebanyak 23% atau 16 orang, dan yang berusia lebih dari 41 tahun sebanyak 10% atau 7 orang.

Berdasarkan jawaban dari responden yang disebarakan melalui kuesioner kepada pengunjung dan pengelola Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang diketahui bahwa setiap indikator dari masing-masing variabel rata rata memiliki nilai skala mean yang tinggi dan menunjukkan tanggapan responden terhadap indikator setuju hingga sangat setuju.

Pada variabel pendapatan desa Permendagri No.20/2018 mendefinsikan tentang pendapatan desa adalah semua peneri-maan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.Usaha pemerintah dalam me-majukan pedesaan agar tidak menjadi wilayah tertinggal, salah satunya adalah desa diberipendapatan dari pemerintah pusat atau daerah agar bisa membiayai rumah tangga desanya sendiri serta dapat memberi *stimulus* untuk memperoleh pendapatan asli desa yang lebih tinggi melalui program yang sesuai dengan karakteristik desanya. Hal ini dapat dilakukan desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yang terbukti salah satu destinasi wisatanya yaitu Cafe Sawah Pujon Kidul menjadi wisata yang cukup diminati para wisatawan.

Pada variabel dana desa yang didefinisi-kan dari Buku Saku Dana Desa, (2017)adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Dapatdilihat bahwa dana desa mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Cafe Sawah Pujon Kiduldengan pengelolaan dana desa yang secara tepat dan tidak terjadi penyimpangan, akan mengurangi tingkat kemiskinan hingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pada variabel ekonomi pengembangan yang didefinisikan oleh Helmsing dan Najiyati, (2015) proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan atau lokasi yang dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain komoditasyang dapat dikembangkan di Cafe Sawah Pujon Kidul, pengembangan daya saing,

pengembangan sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi merupakan beberapa faktor keberhasilan dalam mengembangkan ekonominya.

Pengaruh Dana Desa terhadap Pendapatan Desa

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan desa yang diketahui secara uji t (parsial) menunjukkan hasil variabel dana desa (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,002 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji t (parsial), serta perbandingan antara nilai t_{hitung} variabel dana desa (X_1) sebesar 3,209 atau lebih besar dari ($>$) nilai t_{tabel} 1,994 yang menjadi nilai acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang dikelola secara baik akan meningkatkan pendapatan asli desa dan juga memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakatnya. Tentunya keseluruhan proses pengelolaan dana desa juga harus diimbangi dengan pengawasan dari lembaga dan masyarakat, agar pemakaian dana desa bisa dilakukan secara optimal serta terhindar dari tindak penyimpangan. Hasil penelitian ini semakin memperkuat pendapat dari Dewi dkk., (2018) yang menyatakan bahwa dana desa secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan desa.

Pengaruh Ekonomi Pengembangan terhadap Pendapatan Desa

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa ekonomi pengembangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan desa yang diketahui secara uji t (parsial) yang menunjukkan hasil variabel ekonomi pengembangan (X_2) memiliki nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji t (parsial), serta perbandingan antara nilai t_{hitung} variabel ekonomi pengembangan (X_2) sebesar 4,637 atau lebih besar dari ($>$) nilai t_{tabel} 1,994 yang menjadi nilai acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memanfaatkan dan mengelola potensi alam yang ada di desa Pujon Kidul sehingga keberadaan destinasi wisata Cafe Sawah sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal bisa memberikan kontribusi yang besar dan menjadi salah satu motor penggerak BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul. Cafe Sawah juga berperan memberikan peluang usaha baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan sewa *homestay*, wisata ternak (sapi perah), sewa kuda, dll dan juga mengurangi pengangguran serta meningkatkan kreatifitas pemuda disana agar dapat bertanggung jawab mengelola desanya. Selain itu sarana dan prasarana dibangun memadai untuk mendukung fasilitas yang ada di destinasi wisata Cafe Sawah. Keseluruhan hal diatas membuat dampak positif terhadap peningkatan pendapatan desa di Pujon Kidul. Hasil penelitian ini semakin memperkuat pendapat dari Susanti dkk., (2015) yang menyatakan bahwa ekonomi pengembangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan desa.

Pengaruh Dana Desa dan Ekonomi Pengembangan terhadap Pendapatan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel dana desa (X_1) dan variabel ekonomi pengembangan (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel pendapatan desa (Y). Hasil ini dapat diketahui melalui uji F (simultan) yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji F (simultan), dan perbandingan antara nilai F_{hitung} variabel dana desa (X_1) dan ekonomi pengembangan (X_2) adalah sebesar 77,905 atau lebih besar dari ($>$) nilai F_{tabel} 3,13 yang menjadi nilai acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Serta pengujian yang dilakukan melalui uji

koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa dana desa dan ekonomi pengembangan mempengaruhi pendapatan desa sebesar 69,9% yang berarti angka ini cukup tinggi karena 30,1% pengaruhnya adalah variabel-variabel yang tidak disertakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan dana desa di Cafe Sawah Pujon Kidul dikelola dengan baik dan tidak terjadi tindak penyimpangan serta diimbangi dari segi pemerintah dan masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada disana, sehingga dapat mengembangkan ekonomi Cafe Sawah Pujon Kidul dan meningkatkan pendapatan desanya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil deskripsi variabel penelitian yang diuji melalui frekuensi deskripsi tanggapan responden menunjukkan indikator dana desa (X_1), ekonomi pengembangan (X_2) dan pendapatan desa (Y) sudah sangat baik, rata-rata tiap indikator yang diuji melalui sebaran kuesioner memiliki nilai skala yang tinggi. Secara uji *validitas* dari ketiga variabel dinyatakan *valid* karena keseluruhan indikator memiliki nilai koefisien korelasi lebih tinggi dari ($>$) 0,5 yang menjadi nilai taraf koefisien korelasi. Ketiga variabel juga telah di uji secara *realibilitas* dengan hasil yang reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *cronbach alpha* lebih tinggi dari ($>$) 0,700 yang menjadi nilai taraf *cronbach alpha*.
2. Dari hasil pengujian dengan uji t (parsial), menunjukkan bahwa dana desa (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan desa (Y) di destinasi wisata Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi variabel dana desa (X_1) sebesar 0,002 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji t (parsial), serta perbandingan antara nilai t_{hitung} variabel dana desa (X_1) sebesar 3,209 atau lebih besar dari ($>$) nilai t_{tabel} 1,994 yang menjadi nilai acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Selanjutnya hasil pengujian dengan uji t (parsial), menunjukkan bahwa ekonomi pengembangan (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan desa (Y) di destinasi wisata Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi variabel ekonomi pengembangan (X_2) sebesar 0,000 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji t (parsial), serta perbandingan antara nilai t_{hitung} variabel ekonomi pengembangan (X_2) sebesar 4,637 atau lebih besar dari ($>$) nilai t_{tabel} 1,994 yang menjadi nilai acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
3. Dari hasil pengujian dengan uji F (simultan), menunjukkan bahwa dana desa (X_1) dan ekonomi pengembangan (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan desa (Y) di destinasi wisata Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang. Hal ini dibuktikan dengan dengan nilai signifikan dana desa (X_1) dan ekonomi pengembangan (X_2) adalah senilai 0,000 atau kurang dari ($<$) 0,05 yang merupakan taraf nilai signifikansi uji F (simultan), serta dengan hasil perbandingan dari nilai F_{hitung} variabel dana desa (X_1) dan ekonomi pengembangan (X_2) adalah senilai 77,905 atau lebih besar dari ($>$) nilai F_{tabel} 3,13 yang nilai menjadi acuan penentu hipotesis, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima.
4. Dari hasil pengujian secara parsial telah diketahui nilai t_{hitung} dari variabel dana desa (X_1) adalah 3,209 dan variabel ekonomi pengembangan (X_2) adalah 4,637. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima karena nilai t_{hitung} dari

variabel ekonomi pengembangan (X_2) lebih besar dari nilai t_{hitung} variabel dana desa (X_1), serta juga menjelaskan bahwa variabel ekonomi pengembangan (X_2) merupakan variabel yang lebih dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Muhammad Eko, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Dana Desa/ 7/Vol. 5.No.1.Tahun 2017*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten*. *Jurnal Riset Manajemendan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No.1: 9-20 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165*. Bondowoso : Universitas Islam Attahiriyah.
- Dewi, Ratna Sari dan Ova Novi Irama. 2018. *Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol.5. No.2. September, 2018 p-ISSN 2339-0492 | e-ISSN 2599-1469*. Medan : Univesitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
- Donuisang, Melkisedek Ruben, Ida Soewarni, Ardiyanto M.Gai. 2017. *Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Petik Mawar Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. *Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota*. Malang : Institut Teknologi Nasional.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hermawan, Hary. 2016. *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. *Jurnal Pariwisata, Vol. III No. 2 September 2016 ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220*. Yogyakarta : STP AMPTA.
- Muamanah, Sri. 2020. *Pengaruh Anggaran Dana Desa Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemendan Bisnis (JIM2B) Volume 3 No. 1 Januari 2020 e-ISSN 2686-5831*. Riau : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat.
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6. Hal.1203-1212*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Putra, Mirza Iskandar. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Susanti, Etika Ari, Imam Hanafi, Romula Adiono. 2015. *Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4, Hal 31-40*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tumbel, Satria Mentari. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran*. Jurnal Program Studi PSP Pascasarjana. Manado: Universitas Sam Ratulangi .

Peraturan dan Perundangan :

Bappenas, 2005. *Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas. Jakarta

Bappenas, 2006. *Panduan Nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta.

Buku Saku Dana Desa. 2017. Diakses dari <<http://gurudesas.com/index.php/2018/01/23/buku-saku-dana-desa/>> [Akses : 05 Januari 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 205/PMK.07/2019. *Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Diakses dari <www.jdih.kemenkeu.go.id> [Akses : 03 Januari 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses dari <www.jdih.kemenkeu.go.id> [Akses : 03 Januari 2020.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010. *Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata*. Diakses dari <www.jdih.kemenparekraf.go.id> [Akses : 05 Januari 2020.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 16 Tahun 2018. *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Diakses dari <www.jdih.kemendes.go.id> [Akses : 05 Januari 2020

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 21 Tahun 2015. *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Diakses dari <<http://gurudesas.com/index.php/2018/01/23/permendes-no-21-th2015-tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2016/>> [Akses : 05 Januari 2020.

Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 101. *Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Diakses dari <www.djpk.kemkeu.go.id> [Akses : 06 Januari 2020.

Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*. Diakses dari <www.dpr.go.id> [Akses : 03 Januari 2020.

Undang-Undang, Nomor 25 tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Diakses dari <www.dpr.go.id> [Akses : 05 Januari 2020.

Undang Undang, Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses dari <www.dpr.go.id> [Akses : 05 Januari 2020.

<https://blog.bumdes.id/2017/10/yuk-kenal-lebih-jauh-tentang-dana-desa/>

<http://catatankuliahpraja.blogspot.com/2011/04/sumber-pendapatan-desa.html>

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/regional/indikator-keberhasilan-pembangunan-desa>

<https://sie.pujonkidul.desa.id/bumdes.php>

<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>